

**ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA  
TAHUN 2012-2017**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**ROSIDA HASIBUAN**  
**NIM. 56154037**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA  
TAHUN 2012-2017**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Islam  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh:

**ROSIDA HASIBUAN**

**NIM.56154037**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN  
ASLI DAERAH DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
TAHUN 2012-2017

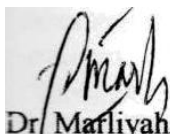
Oleh :

ROSIDA BASIBUAN  
NIM 56154037

Dapat disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medau, 17 Oktober 2019

I



Dr. Maftiyah, MA  
NIP.19760126 2003122003

Pembimbing II



Nurhaini M. K. N  
NIP.197908082015032001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Dr. M. Dinah MA  
NIP. 19760126 2003122003

## **ABSTR AK**

**ROSIDA HASIBUAN**, 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara. Di bawah bimbingan Pembimbing Skripsi I Ibu Dr. Marliyah, M.A dan Pembimbing II Ibu Nurbaiti, M. Kom

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Padang Lawas Utara dan sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sementara itu teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan program eviews 8. Dari hasil regresi, variabel Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah. Variabel Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah, variabel Lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan positif terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen mampu menjelaskan oleh variabel-variabel independen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, lain-lain PAD yang Sah, sebesar 93 % sedangkan sisanya sebesar 7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini.

**Kata Kunci** : PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah.

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Alhamdulillah, alhamdulillahirobbil'alamin wahdahu wassholatu wassalamu 'ala ashrofil anbiyaa wal mursalin wa'ala aalihi wasohbihi wasallam ajma'in amma ba'du, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam atas rahmat dan karunianya, petunjuk dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **"Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012-2017"**. Sholawat dan Salam saya hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang, serta membawa manusia kepada kehidupan yang penuh keimanan dan keislaman. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut dan yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhirat kelak, aamiin, aamiin ya robbal'alamin.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Studi Ekonomi Islam di UIN Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini disadari begitu banyak pertolongan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Teruntuk yang paling istimewa kepada ayahanda penulis Awaluddin Hasibuan dan Ibunda tersayang Samsinar yang telah memberikan kasih sayang dan kepercayaan yang diberikan serta dukungan, baik

moril maupun materil yang selama ini penulis nikmati, doa dan restu serta dorongan semangat hingga timbul kepercayaan diri untuk menyelesaikan studi hingga kejenjang Sarjana Ekonomi. Adinda tersayang, Kholiza Hasanah Hasibuan S.Pd, Rika Isnaini Hasibuan S.Pd, Minta Ito Hasibuan, Ahmad Pontas Habibi Hasibuan, Bela Ikhwansyah Hasibuan, Abdul Tulus Hasibuan dan Qurrota A'yun Hasibuan yang telah memberikan hiburan, semangat, motivasi dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Sebab tanpa adanya pertolongan tersebut tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat sesuai dengan waktunya. Oleh karenanya, penulis pun menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Saidurrahman Harahap, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara dan Wakil Dekan I, II, III.
3. Dr. Marliyah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Bapak Imsar, SE.I. Msi. Selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Islam.
5. Dr. Marliyah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Nurbaiti, M.Kom selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam membina penulis untuk menyusun skripsi ini.
6. Ibu Neila Susanti, SE, Msi. Selaku Pembimbing Akademik (PA) EKI-E Stambuk 2015.

7. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang juga telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mendidikan penulis menjadi mahasiswa yang memiliki pendirian dan mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat kepada orang-orang yang belum mengetahui mengenai Ekonomi Islam.
8. Teman-teman Eki- E yang pernah menjadi shohibul mujahid, teruntuk Sukma Jayanti SE, yang sangat banyak membantu penulis, semoga Allah senantiasa melindungi kita dari perbuatan yang dilarang olehnya, dan selalu meridhoi langkah kita dalam menjalani kehidupan ini.
9. Teman- teman Squad Arfah Batubara, Dwi Kharvina Siregar, Nur Sahada, Syaufa Yardha, Yeni Putrima SE, dan Sri Cahya Ningsi. Yang selalu memberikan dorongan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman saya yang ada di Eki B , Ayu, SE yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
11. Teman-teman KKN Jahira Mahfuza, Juwita, Muhammad Taufan. Yang dimana mereka telah menyemangati dan membantu penulis dari seminar proposal, ujian kompri dan menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman kost sekaligus oce saya Nurlaili Anna Rambe, Amd.Ak, Anita Ritonga Am.keb.
13. Teman sekaligus sahabat seperjuangan saya Harnita Ritonga, Esma Mariana Ritonga, Mairo Rambe, Hapsa Hasibuan, Adi Syahputra Rambe, Hari Wandani Siregar, yang telah memberikan hiburan kepada sipenulis.

14. Yang teristimewa kepada semua pihak lainnya yang tidak bisa semuanya dituliskan dalam kata pengantar teramat singkat ini. Semoga bantuan yang telah semua pihak berikan kepada penulis dapat dibalas Allah Swt dengan curahan pahala yang tiada pernah bisa mengering sampai kapan pun.

Penulis telah berupaya dengan sekuat tenaga dalam menyelesaikan skripsi ini, namun disadari masih terdapat banyak kekurangan yang kiranya dari sisi isi dan tata bahasanya. Sembari itu penulis menantikan saran dan kritik yang berguna untuk menyempurnakan skripsi ini. Pada akhir kata ini penulis dapat menyampaikan rasa terimakasih dan berharap apa yang ada di dalam skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Aamiin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Medan, 17 Oktober 2019  
Penulis

**Rosida Hasibuan**  
**Nim. 56154037**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Wz rang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Rosida Hasibuan
nmi	56.15.4.037
W Program Studi	: Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Darah di Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2012-2017

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini :nar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-Kutipan dan nngkasar-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya Atas yataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini atau ada klaiiu dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Medau, 17 Oktober 2019

Saya yang Bermohon



**Rosida Hasibuan**  
hioi. 56154037

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>

## **BAB I : PENDAHULUAN1**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9

## **BAB II :KAJIAN TEORITIS ..... 10**

A. Kajian Teoritas .....	10
<b>1. Pendapatan Asli Daerah.....</b>	<b>10</b>
a. Pengertian Asli Daerah.....	10
<b>2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah .....</b>	<b>11</b>
a. Pajak Daerah.....	11
b. Retribusi Daerah.....	21
c. Lain-lain PAD yang Sah.....	30
d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan .....	31
<b>3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PAD .....</b>	<b>32</b>
a. PDRB Perkapita.....	32
b. Investasi Swasta .....	33

c. Inflasi.....	34
<b>B. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>35</b>
<b>C. Kerangka Teoritas .....</b>	<b>37</b>
<b>D. Hipotesi .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
C. Jenis dan Sumber Data .....	40
D. Populasi dan Sampel .....	40
E. Definisi Operasional .....	41
F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	42
G. Analisis Data .....	42
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	48
B. Deskripsi Data Peneliti.....	49
C. Uji Asumsi Klasik.....	53
1. Uji Normalitas.....	54
2. Uji Heteroskedastisitas .....	54
3. Uji Multikolinieritas.....	55
4. Uji Autokorelasi .....	55
D. Uji Hipotesis .....	56
1. Uji Model R <sup>2</sup> (Adjust Square) .....	56
2. Uji t- Statistik .....	57
3. Uji f- Statistik. ....	58
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1 :Realisasi PAD di Kab. Padang LawasUtara 2012-2017 .....</b>	<b>4</b>
<b>Tabel 2.2 : Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 3.4 : PAD di Kabupaten Padang Lawas Utara 2012-2017 .....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel 4.4 : Pajak Daerah di Kab. Padang Lawas Utara .....</b>	<b>51</b>
<b>Tabel 5.4 : Retribusi Daerah .....</b>	<b>52</b>
<b>Tabel 6.4 : Lain-lain PAD yang Sah .....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 7.4 : Uji Multikolonieritas.....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel 8.4 : Uji Hipotesa .....</b>	<b>56</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1.2 :Kerangka Berpikir .....</b>	<b>37</b>
<b>Gambar 2.4 :Grafik Uji Normalitas .....</b>	<b>54</b>
<b>Gambar 3.4 :Uji Heteroskedestisitas.....</b>	<b>54</b>
<b>Gambar 4.11:Uji Autokorelasi.....</b>	<b>55</b>

## **LAMPIRAN**

Gambar Uji Heteroskedestisitas

Tabel Uji Normalitas

Tabel Realisasi PAD Kabupaten Padang Lawas Utara

Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi

Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan otonomi daerah dijiwai oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu tentang Pemerintah Daerah.

Daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan daya guna hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Undang-undang direvisi dan disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan direvisi yang kedua menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dengan memperhatikan

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD yang merupakan bagian dari Pendapatan Daerah sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara PAD dengan Total Pendapatan daerah pada APBD. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Satu hal yang perlu dicatat adalah peningkatan PAD bukan berarti daerah harus berlomba-lomba membuat pajak baru, tetapi lebih pada upaya memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

Berlakunya produk hukum mengenai pemerintahan daerah tersebut membawa angin segar dalam pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensinya pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan tugas tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan karena salah satunya perlu kemampuan ekonomi yaitu: pertama, adalah tentang bagaimana pemerintah daerah dapat menghasilkan *financial* untuk menjalankan organisasi termasuk memberdayakan masyarakat, kedua, bagaimana pemerintah daerah melihat fungsinya mengembangkan kemampuan ekonomi daerah. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk sumber-sumber keuangan sendiri.

Untuk menjalankan fungsi pemerintahan faktor keuangan suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. Pemerintah daerah tidak hanya menggali sumber-sumber keuangan akan tetapi juga sanggup mengelola dan menggunakan secara *value for money* dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat dapat ditekan. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD)

---

<sup>1</sup>Abdul Halim, *Pajak Daerah*, (Jakarta: Media, 2015), h. 37.



menjadi sumber keuangan terbesar. Kegiatan ini hendaknya didukung juga oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai persyaratan dalam sistem pemerintahan Negara. Undang-Undang No. 33/2004 perubahan UUNo.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari daerah itu sendiri yang terdiri dari; (1) hasil pajak daerah, (2) hasil dari retribusi daerah, (3) hasil dari perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dengan berbagai pos pendapatan sumber dana yang tersedia diharapkan dapat menyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerah.

Dalam proses menuju kemandirian sebuah daerah otonomi dalam hal ini terutama dalam bidang pembiayaan, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pembangunan dirasa masih kurang. Kenyataan ini tercermin dari peranan sumbangan atau kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dirasa masih rendah, khususnya untuk PAD kabupaten/kota.<sup>2</sup> Permasalahan yang sama juga dihadapi pemerintah daerah kabupaten Padang Lawas Utara dalam hal ini peningkatan pembiayaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, untuk itu penelitian kali ini dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas Utara tentang pengaruh Pajak, Retribusi Pendapatan Asli Daerah yang sah terhadap PAD dengan menggunakan data sekunder periode penelitian 2012-2017.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Muhammad Riduansyah, *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 423

<sup>3</sup>Ahmad Ramadhan Harahap, “ *Analisi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara*, ” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Medan, 2014), h. 3.

Berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2012. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara telah berupaya terus menerus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan berbagai cara seperti memperluas cakupan pungutan pajak dan retribusi, efisiensi biaya pungutan dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Lawas Utara selama 5 tahun terakhir ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi PAD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012-2017**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>
<b>2013</b>	15.804.225.385,65	5.894.591.525,00	5.915.196.812,00	465.308.284,00	3.529.128.732,45
<b>2014</b>	22.172.689.275,33	4.487.322.409,00	6.591.423.392,00	290.557.944,00	10.803.385.530,33
<b>2015</b>	26.446.077.260,84	4.693.774.307,00	5.566.728.436,00	479.588.562,00	15.705.985.955,84
<b>2016</b>	30.453.223.133,26	6.503.992.499,00	2.764.715.957,00	475.167.290,00	20.709.347.387,26
<b>2017</b>	74.524.919.692,80	13.570.377.879,97	12.523.583.485,00	804.492.343,00	47.626.465.984,83

Sumber: BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah)Kab. Padang Lawas Utara

Tabel diatas menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2013-2017 mengalami turun dan naik dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang sangat drastis. Adapun Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap PAD Kabupaten Padang Lawas Utara pada Tahun 2013-2017. Hal ini bisa dilihat dalam Pajak Daerah yang mengalami naik turun di setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp5.643.202. 290,00, kemudian mengalami penurunan di tahun 2014 sebesar Rp4.487.322.409,00. Kemudian pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp4.693.774.307,00 . Kemudian pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan sebesar Rp6.503.992.499,00, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikannya itu dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Sedangkan sumber penerimaan daerah dari Retribusi Daerah terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 memiliki kontribusi sebesar 5.280.303.932,00 dan

mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp 6.591.423.392,00 dan ditahun 2015 kembali mengalami penurunan sebesar Rp 5.566.728.436,00 dan ditahun 2016 sebesar Rp 2.764.715.957,00. Akan tetapi, pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat tajam sebesar Rp 12.523.583.485,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan sumber penerimaan PAD yang memiliki kontribusi paling rendah. Akan tetapi, semua sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebenarnya sangat berpotensi biladigali secara maksimal.

Undang- undang No. 33/2004 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah akan meningkat apabila Pajak Daerah meningkat. Namun ditahun 2014 Pajak Daerah dikabupaten Padang Lawas utara menurun sedangkan Pendapatan Asli Daerahnya Meningkat, dan ditahun 2015 Retribusi Daerah di Padang Lawas Utara Menurun sedangkan Pendapatan Asli Daerahnya meningkat. Sedangkan Lain-lain PAD yang Sah dari tahun 2013-2015 mengalami kenaikan yang cukup drastis dari tahun- tahun sebelumnya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan murni daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Semua pendapatan daerah itu mempunyai peranan penting dalam keuangan daerah yang merupakan salah satu tolak ukur didalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional. Pada hakikatnya retribusi daerah lebih beraneka ragam dan bervariasi antara daerah yang satu dengan yang lain. Semakin maju suatu daerah akan semakin banyak fasilitas atau jasa yang perlu disediakan untuk pemenuhan kegiatan ekonomi dan

sosial masyarakat sehingga semakin banyak pula jasa-jasa yang dapat dipungut oleh daerah.

Untuk menilai sejauh mana pembangunan bidang ekonomi yang telah dilaksanakan maka sangat diperlukan adanya alat untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan tersebut. Pendapatan regional adalah suatu indikator berupa data agregat yang sampai saat ini banyak negara termasuk Indonesia masih memakai data tersebut untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun regional. PDRB merupakan data statistik untuk memberikan gambaran-gambaran keadaan ekonomi baik di masa lalu maupun sekarang dan sebagai evaluasi, perencanaan, dan sasaran yang akan dicapai masa mendatang.

Penerimaan daerah perlu terus diupayakan dengan peningkatan adanya penggalian potensi sumber-sumber dana yang ada sehingga dapat potensi sumber-sumber dana yang ada menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya.

Upaya perbaikan sangat diperlukan terutama di bidang pengelolaan keuangan daerah. Berbagai kebijakan tentang keuangan daerah diarahkan agar daerah memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuannya dalam membiayai penyelenggaraan urusannya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan diberikannya kewenangan oleh pemerintah pusat berupa kewenangan yang kuat, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional. Untuk mempercepat tercapainya kemandirian khususnya perusahaan-perusahaan swasta diharapkan kontribusinya dalam sumber lain-lain PAD yang sah.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk memilih judul dalam penelitian ini yaitu: **“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012-2017”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

---

<sup>4</sup>Lutfi Ahmad, *Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah*, (Bandung: Pustaka Media, 2014), h. 125

Berdasarkan permasalahan diatas maka diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, lain lain PAD yang sah.
2. Sumbangan atau kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dirasa masih rendah, khususnya untuk kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Pajak daerah mengalami naik turun setiap tahunnya dari tahun 2012-017, di tahun 2017 pajak daerah menaik sangat drastis sebesar 13.570.377.879,97 dari tahun sebelumnya.
4. Tahun 2014 PAD mengalami kenaikan namun Pajak Daerah di tahun 2014 mengalami penurunan..
5. Tahun 2015 Retribusi Daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, akan tetapi Pendapatan Asli Daerahnya meningkat.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara. Sehingga peneliti memfokuskan pada, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Alasan penelitian ini dibatasi agar lebih terarah dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, perlu adanya pembatasan masalah pada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara?

2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara Daerah?
3. Apakah Lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara ?
4. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini berguna untuk:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan asli daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara .
- b. Untuk mengetahui Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Lain-lain PAD terhadap pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Untuk bahan studi tambahan bagi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khusus-nya mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara.
- b. Untuk menambah pengetahuan tentang faktor- faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara.

- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara.

#### **F. Batasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman penulis dalam penelitian ini, maka penulis membuat batasan istilah sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahaminya. Yaitu tentang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITAS**

#### **A. Kajian Teoritas**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah**

###### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Waristo menjelaskan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna mempekecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas. Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.



Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.<sup>5</sup>

## **2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

### **a. Pajak Daerah**

Pajak daerah secara umum adalah kontribusi wajib kepada Daerah orang yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar hukum baru untuk pajak daerah dan restribusi daerah Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.)<sup>6</sup>

Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pajak provinsi, terdiri dari:
  - a. Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber-sumber daya menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat

---

<sup>5</sup>Diana Lestari, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda” dalam *Jurnal Pendapatan Asli Daerah*, vol. 27 No.5 Oktober 2017, h. 644.

<sup>6</sup>Ricky Griffin, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Raya), h. 535.

besar yang bergerak yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Terhadap pengalihan ini dikenakan bea atau pajak
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor (pertamina atau produsen bahan bakar lainnya) pada waktu konsumen membeli bahan bakar tersebut
- d. Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan; adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. Pajak Hotel; adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dan dipergunakan untuk

memperkenalkan, meenganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa, orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan pemerintah. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame antara lain reklame papan, billboard, videotron, megatron, reklame kain, reklame melekat, (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame film (slide), reklame peragaan, reklame apung. Adapun reklame yang melalui internet, televisi, radio, warta harian/ mingguan/ bulanan dan sejenisnya tidak termasuk objek pajak reklame.

- e. Pajak Penerangan Jalan; adalah pajak penerangan jalan agak sedikit berbeda yakni pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan dengan peraturan daerah dengan ketentuan maksimum sebesar 10%. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3 % (persen) tetapi penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (diubah menjadi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009); adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan di bidang mineral dan batubara.
- g. Pajak Parkir; adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Tidak termasuk subjek pajak ini apabila penyelenggaraan tempat parkir dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Demikian juga apabila diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional, maka dalam hal ini berlaku atas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara. Dasar pengenaan dari pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Sedangkan besarnya tarif ditetapkan dengan peraturan daerah dan maksimum sebesar 30% dasar pengenaan pajak parkir dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir.

h. Pajak lain-lain<sup>7</sup>

**a) Cara menghitung Pajak Daerah**

Menurut Undang-undang tarif ditetapkan paling tinggi (maksimal) sebesar:

1. PKB (termasuk Kendaraan di atas air) 10% (sepuluh persen). Khusus kendaraan pribadi dapat diterapkan tarif progresif;
2. BBNKB (termasuk Kendaraan di atas air) 20% (dua puluh persen)
3. Pajak Kendaraan Bermotor 10% (sepuluh persen). Khusus kendaraan angkutan umum, tarif dapat ditetapkan lebih rendah;
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen);
5. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);
6. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);
7. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen), untuk hiburan tertentu tarif dapat mencapai 75%;
8. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);

---

<sup>7</sup>Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., AK, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset), h. 13.

9. Pajak Penerangan jalan 10% (sepuluh persen);
10. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C atau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25% (dua puluh lima persen);
11. pajak Parkir 30% (tiga puluh persen);

#### **b) Pajak Dalam Perspektif Islam**

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah* yang berasal dari kata *dhoroba* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *Al-jizyah*, dan *Al-kharaj* sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.<sup>8</sup>

Adapun beberapa ulama yang memberikan definisi pajak dalam islam diantaranya yaitu:

- 1) Yusuf Qardhawi berpendapat, “pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial politik dan tujuan-tujuan lainnya yang ingin dicapai oleh negara.”
- 2) Gazi Inayah berpendapat, “pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu.
- 3) Abdul Qadim Zallum berpendapat, “pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 28-29.

<sup>9</sup>Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.31-32.

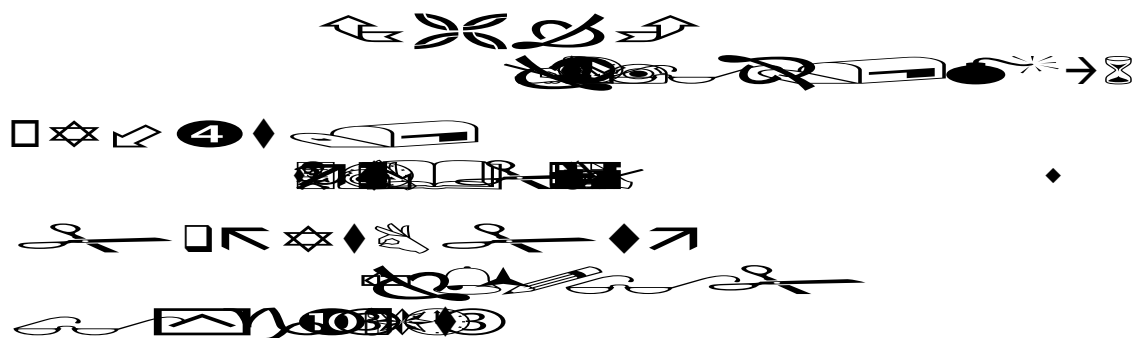
Pajak dibolehkan dalam islam karena alasannya untuk kemaslahatan umat, maka pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim dengan alasan dan pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai mak akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatn adalah kewajiban. Oleh karena itu, pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan, pendidikan, gaji para tentara, pegawai, guru, hakim dan sejenisnya. Oleh sebab itu, pajak memang merupakan kewajiban negara dalam sebuah negara islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat), yaitu:

1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efesien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

### c) Hukum Pajak Dalam Islam

Ada dua pendapat ulama mengenai pajak dalam islam:

**Pendapat pertama** menyatakan bahwa pajak tidak boleh dibebankan kepada kaum muslimin karena kau muslimin sudah dibebani dengan kewajiban zakat. Berdasarkan firman allah swt dalam surat An-Nisa:29



Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.."* (QS. An-Nisa:29)<sup>10</sup>

Dalam ayat ini Allah melarang hambanya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya<sup>11</sup>. Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, diantaranya bahwa Rasulullah SAW bersabda:

ان صا حب المكس ني النار

Artinya: *"Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak diadzab di neraka.* (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Hadits inilah yang acap kali digunakan untuk mengharamkan memungut pajak, dan juga sebagai dalih untuk tidak membayar pajak. Serta untuk mengharamkan secara total apa-apa yang berbau pajak. Dan ancamannya juga tidak main-main, yaitu api neraka yang pedih.

**Pendapat Kedua** para ulama menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara ulama yang membolehkan pemerintah Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Al-Ghazali, Imam Syatibi dan Imam Ibnu Hazm. Dan sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ فِي الْأَمْوَالِ لَأَحْطَىٰ سَبِيلَ  
الزَّكَاةِ

Artinya: *"Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat."*(HR Tirmidzi, No: 595 dan Darimi, No : 1581, di

---

<sup>10</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 3*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 255.

<sup>11</sup><https://nainah93.wordpress.com/2013/09/23/makalah-pajak-dalam-islam/> diunduh tgl 12 Januari 2019 Jam 14:21wib.

dalamnya ada rawi Abu Hamzah (Maimun). Menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah dho'if hadist dan menurut Imam Bukhari dia tidak cerdas.

Dalam konteks Indonesia, Direktorat Jendral (Ditjen) pajak untuk tidak tebang pilih dalam menerapkan aturan perpajakan pada berbasis syariah di Indonesia telah terbit, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 dengan tajuk Pajak penghasilan (PPh) Atau Bidang Usaha Berbasis Syariah. Maka mulai tahun ini, penghasilan yang di dapat dari usaha maupun transaksi berbasis syariah baik oleh wajib pajak (WP) pribadi maupun badan bakal dikenakan PP. Penerbitan PP PPh syariah ini merupakan bentuk aturan pelaksanaan yang diamanatkan Pasal 31D UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.<sup>12</sup>

#### **d) Karakteristik Pajak (*Dharibah*) Menurut Islam**

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut Syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-muslim), yaitu:

- 1) Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.
- 2) Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- 3) Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab, *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-

---

<sup>12</sup><http://syiar.republika.co.id/36836/hukum-pajak-untuk-Syariah> di unduh tgl 12 Januari 2019 Jam 14:27 wib.



Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.

- 4) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-Islam, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau PNN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.
- 5) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- 6) Pajak (*dharibah*) yang dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.<sup>13</sup>

#### **e) Jenis Pajak Dalam Islam**

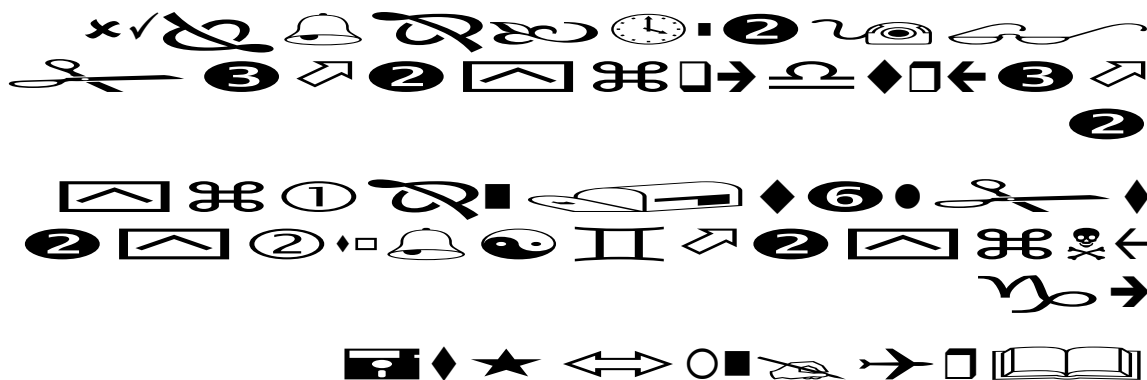
Pada masa Islam ada beberapa hal yang dapat digolongkan dalam bentuk pajak, yaitu:

- 1) Jizyah, yaitu upeti yang harus dibayarkan oleh ahli kitab kepada pemerintahan Islam.
- 2) Kharaj, yaitu pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam.
- 3) Usyuriyah, yaitu bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam.
- 4) Nawaib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk.

---

<sup>13</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 31.

*Kharaj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. Apabila *jizyah* ditetapkan berdasarkan nash Al-Qur'an, maka *kharaj* ditetapkan berdasarkan ijtihad. Kharaj dalam bahasa Arab adalah kata lain dari sewa dan hasil. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S. Al-Mu'minun: 72 yang berbunyi:



Artinya: “Atau kamu meminta upah kepada mereka?”, Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezki yang paling baik.” (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 72)

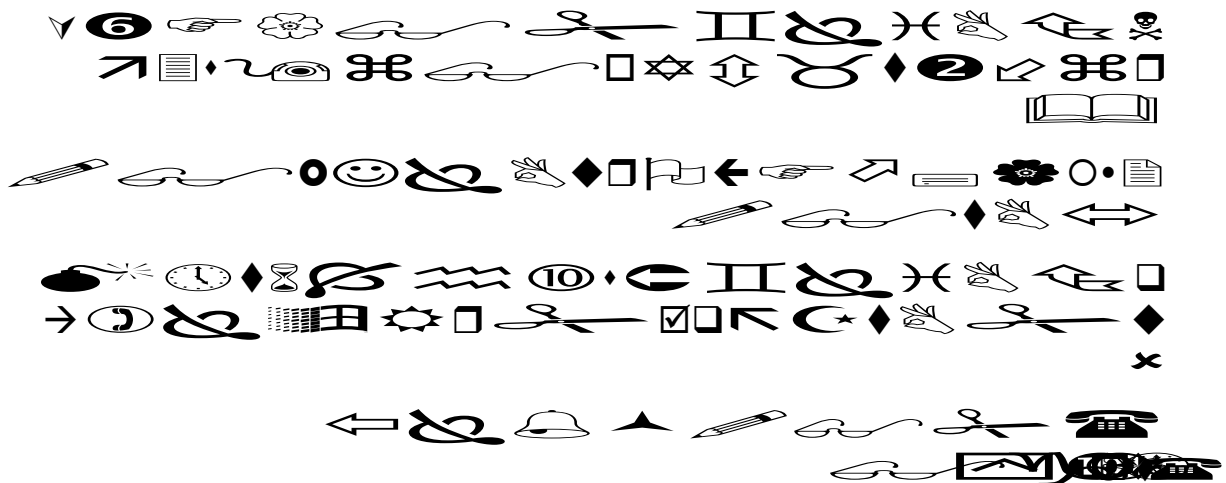
Yang dimaksudkan upah dari Tuhan ialah rezeki yang dianugerahkan Tuhan di dunia, dan pahala di akhirat.<sup>14</sup>

*Kharaj* dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah (pajak proporsional) yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas apakah si pemilik itu seorang dibawah umur, orang dewasa, orang bebas, budak, muslim ataupun non-muslim. Dari sisi subjek (wajib pajaknya), *kharaj* dikenakan atas orang kafir dan juga muslim (karena membeli tanah *kharajiyah*). Apabila orang kafir yang mengelola tanah masuk Islam, maka ia tetap dikenai *kharaj* sebagaimana keadaan sebelumnya. Jika seorang kafir masuk Islam, maka tanah itu tetap menjadi miliknya, dan mereka wajib membayar 10% dari hasil buminya sebagai zakat, bukan sebagai *kharaj*. Sedangkan dari sisi cara pengenaannya, *kharaj* dibagi dua yaitu *kharaj* menurut perbandingan atau proporsional (*muqasamah*) dan *kharaj* tetap (*muwadhdhaf*). *Kharaj* proporsional dikenakan

<sup>14</sup>Al- 'Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005, h. 277.

sebagai bagian total dari hasil pertanian misalnya seperlima, seperempat, dan sebagainya artinya tidak tetap bergantung pada hasil dan harga setiap hasil pertanian. Ia dikenakan setahun sekali dalam jumlah tetap.

‘Ushr dikalangan ahli fiqh terbagi atas dua arti, pertama sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami air hujan. Kedua sepersepuluh yang diambil dari pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangan. Istilah ‘ushr tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, tetapi dalil berikut yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 267 dapat diambil sebagai acuan dan ayat ini ditujukan kepada penguasa. Firman Allah swt.:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. Al-Baqarah[2]: 267)<sup>15</sup>

Pajak dan zakat berbeda, zakat adalah memberikan sebagian harta menurut kadar yang ditentukan oleh Allah bagi orang yang mempunyai harta yang telah sampai nisabnya. Sedangkan pajak tidak ada ketentuan yang jelas kecuali ditentukan oleh penguasa di suatu tempat. Zakat berlaku bagi kaum muslimin saja, hal itu lantaran zakat berfungsi untuk menyucikan pelakunya. Sedangkan pajak berlaku bagi orang-orang yang tinggal di tanah kekuasaan suatu negara. Zakat dan pajak meski keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya berbeda.

## b. Retribusi Daerah

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 35.

Restribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemerintah Daerah meliputi gubernur, bupati, atau walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.<sup>16</sup> Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah antara lain:

- a) *Retribusi Daerah*, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b) *Jasa*, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- c) *Jasa Umum*, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- d) *Jasa Usaha*, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- e) *Perizinan tertentu*, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber

---

<sup>16</sup>Ricky Griffin, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Raya), h. 536.

daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut
  - a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
  - b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
  - c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
  - d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
  - e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
  - f. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial;
  - g. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa-jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik;

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seobyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; adalah penggunaan tanah yang tidak yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
  - a. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; berdasarkan Objek Retribusi Pasar Grosir dan atau perkotaan adalah penyediaan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh BUMN/ BUMD, dan pihak swasta.
  - b. Retribusi Tempat Pelelangan; Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelanggan serta fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelanggan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelanggan, termasuk juga juga tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan, tetapi tidak termasuk tempat pelelangan yang

disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh BUMN/BUMD, dan pihak swasta.

- c. Retribusi Terminal; adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh BUMN/BUMD, dan pihak swasta.
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir; adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan dimiliki dan / atau dikelola oleh BUMN/BUMD, dan pihak swasta.
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; adalah tempat pelayanan dan penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh BUMN/BUMD, dan pihak swasta.
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan; adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh BUMN/BUMD, dan pihak swasta.
- g. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah tidak termasuk pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan oleh pemerintah, BUMN/ BUMD, dan pihak swasta
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN/ BUMD, dan pihak swasta
- i. Retribusi Penyebrangan di Atas Air; adalah pelayanan penyebrangan orang atau barang-barang dengan menggunakan



kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk pelayanan penyebrangan yang dikelola oleh pemerintah, BUMN/ BUMD, dan pihak swasta

- j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- k. Retribusi Penjualan Produk Daerah; adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, tidak termasuk penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN/ BUMD, dan pihak swasta.<sup>17</sup>

subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha. Rincian dari jenis retribusi ini diatur dalam pemerintah.

### 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; pemberian IMB meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan

---

<sup>17</sup> Prof. Carunia Mulya Firdausy, *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Indonsia), h. 553.

koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut, tidak termasuk pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.

- b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan; adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja, tidak termasuk tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- d. Retribusi Izin Trayek;

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu. Rincian dari jenis retribusi ini diatur dalam peraturan daerah teknis pemberian perizinan tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah kabupaten sebagian diperuntukkan kepada desa. Bagian desa ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan layanan tersebut. Penggunaan bagian desa ditetapkan sepenuhnya oleh desa.

#### **a) Objek Retribusi Daerah**

Objek Retribusi Daerah terdiri dari:

1. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
3. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### **b) Subjek Retribusi Daerah**

Subjek Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

**c) Cara Menghitung Retribusi Daerah**

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan mengalihkan:

1. Tingkat penggunaan jasa; dan
2. Tarif retribusi.

Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan Tarif Retribusi.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut:

1. Untuk Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, *efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya mmeperhitungkanbiaaya pencetakan dan pengadministrasian.*
2. Untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagiann atas seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan *meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di*

*lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.*

Cara perhitungan besarnya Retribusi serta prinsip dan sarana penetapan tarif diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. *Penetapan tarif Retribusi dengan Peraturan Daerah.*

#### **d) Pembayaran Retribusi Daerah**

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan yang tidak atau kurang dibayar dan di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. Penagihan Retribusi tentang yang tidak atau belum dibayar harus didahului dengan Surat Teguran.

Apabila WP atau Wajib Retribusi mempunyai utang pajak atau utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran pajak atau retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak atau utang retribusi tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak atau retribusi.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Direktur Poliban Edi Yohanes, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia), h. 17.

### **c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain bersumber dari penjualan aset tetap daerah, jasa giro. Sesuai dengan pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah.

Pendapatan daerah lainnya yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa Giro.
- c. Pendapatan Bunga.
- d. Keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing.
- e. Komisi, Potongan, atau bentuk lain dari pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.<sup>19</sup>

### **d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang

---

<sup>19</sup>Eko Aprianto, "Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2017), h. 2.

dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN) dan bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.<sup>20</sup>

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

### **3. Faktor –faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli daerah**

Potensi keuangan daerah adalah kekuatan keuangan disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh sumber-sumber penerimaan daerah beberapa faktor tersebut adalah:

#### **a. PDRB Perkapita**

PDRB Perkapita merupakan Nilai Proksi dari pendapatan setiap jumlah penduduk yang diperoleh dari jumlah PDRB dibagi jumlah penduduk, yang bisa sebagai gambaran daya beli Masyarakat. Suatu perekonomian sedang tumbuh dan berkembang apabila adanya serangkaian peristiwa yang timbul untuk mewujudkan peningkatan pendapatan perkapita dalam jangka panjang. Sehingga sekalipun ada satu waktu dimana pendapatan perkapita seolah-olah terhenti namun diwaktu yang akan datang terjadi peningkatan pendapatan, maka ini terdapat pembangunan ekonomi.

Pendapatan terdiri dari upah, atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga, dan deviden, serta pembayaran transfer atau penerimaan tenaga dari pemerintah seperti tunjangan sosial dan asuransi

---

<sup>20</sup>Abdul Halim, *Pajak Daerah dan Keuangan Daerah*, (Jakarta: CV Media, 2015), hlm. 231.

pengangguran. Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposable. Jadi pada hakekatnya pendapatan disposable adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh para penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian, untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang mereka inginkan, tapi biasanya tidak semua pendapatan disposable itu digunakan untuk tujuan konsumsi.

Pendapatan yang diterima rumah tangga berasal dari dua sektor yaitu dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan untuk sektor perusahaan, dan dari pembayaran gaji dan upah untuk sektor pemerintah. Dengan demikian PDRB perkapita adalah sebagai proksi pendapatan masyarakat akan berpengaruh terhadap konsumsi, dengan kata lain meningkatnya pendapatan masyarakat tentunya mengarah kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga meningkat, karena bagaimanapun juga masyarakat terikat pada kebutuhannya akan barang dan jasa. Sejalan dengan hal tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terpengaruh secara positif seiring dengan peningkatan PDRB perkapita tersebut.

#### **b. Investasi Swasta**

Investasi Swasta adalah penanaman modal atau pembentukan modal adalah pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat menaikkan produksi barang dan jasa dimasa akan datang. Pola investasi dalam suatu perekonomian tergantung pada kebijaksanaan pemerintah. Jika pemerintah merencanakan pengeluaran yang besar dibidang pelayanan umum dan barang publik seperti jalan kereta api, listrik, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Maka COR nya akan tinggi. COR ini akan rendah jika pola investasi lebih ditekankan pada pembangunan pertanian dan perindustrian rakyat dan padat karya.

Dinegara penduduk padat seperti indonesia dimana pengangguran cukup banyak, kebijaksanaan pemerintah untuk mengatasi pengangguran dengan cepat akan mengarahkan investasi pada pembangunan jalan raya, pengairan, reklamasi tanah, rumah sakit, sekolah, perumahan dan pekerjaan umum lainnya.



Dengan kondisi tersebut maka COR akan relatif tinggi, karena pembangunan proyek-proyek tersebut membutuhkan modal yang tidak sedikit. Tetapi kebijaksanaan pemerintah mengarah pada penyerapan pengangguran pada industri besar, khususnya industri manufaktur, maka COR akan lebih kecil. Hanya sedikit sekali modal dan ketenagakerjaan pada industri seperti itu bila dibandingkan dengan pekerjaan umum.

Dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas barang/jasa yang dihasilkan biasanya paling tidak ada dua pilihan, yaitu (1) melakukan investasi modal (fisik) sehingga dapat dihasilkan barang dalam jumlah yang besar dan kemudian secara otomatis akan menurunkan harga barang tersebut untuk dapat bersaing, dan (2) melakukan investasi sumberdaya manusia sehingga dapat menghasilkan suatu barang-barang yang berkualitas. Investasi swasta mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, pendapatan meningkat, daya beli masyarakat meningkat sehingga akan berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan investasi swasta adalah dengan mengusahakan keadaan yang kondusif dan menarik bagi berkembangnya industri dalam negeri dan masuknya investasi asing. Dengan dikeluarkannya.

UU PMA dan PMDN memberikan persyaratan menarik, dan telah membuka kemungkinan bagi pertumbuhan sektor industri dengan landasan yang luas. Sejalan dengan semakin meningkatnya investasi yang berasal dari swasta baik investasi dengan fasilitas PMDN maupun non fasilitas, diharapkan dapat meningkatkan PDRB dari tahun ke tahun.

### **c. Inflasi**

Inflasi adalah kenaikan dalam harga rata-rata, dan harga adalah tingkat dimana uang yang dipertukarkan untuk mendapatkan barang dan jasa. Tingkat inflasi merupakan perubahan prosentase dalam seluruh tingkat harga dan sifatnya selalu bervariasi setiap waktu setiap waktu dan terjadi untuk semua negara. Sudarsono dan Edilius memberikan definisi inflasi adalah sebagai berikut: inflasi adalah suatu proses atau peristiwa kenaikan tingkat harga umum. Jika

seandainya harga-harga dari sebagian barang diatur oleh pemerintah, maka harga-harga yang dicatat oleh Biro Statistik mungkin tidak menunjukkan kenaikan apapun karena yang dicatat adalah harga resmi pemerintah. Tetapi kenyataannya yang terjadi ada kecenderungan bagi harga-harga untuk terus menaik, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi.<sup>21</sup> Didalam teori kuantitas, dijelaskan bahwa sumber utama terjadinya inflasi adalah adanya kelebihan permintaan (*demand*) sehingga uang yang beredar dimasyarakat bertambah banyak. Inflasi merupakan penyakit dalam ekonomi yang dapat melemahkan daya beli masyarakat, akibatnya tingkat konsumsi juga mengalami pengurangan sehingga pengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah adalah berpengaruh negatif.<sup>22</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu:

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Diana Lestari (2016)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda	PAD (Y) PDRB perkapita (X1) Investasi Swasta (X2) Inflasi (X3)	Pengaruh PDRB perkapita terhadap PAD berpengaruh positif signifikan terhadap PAD diterima. Investasi swasta berpengaruh Positif signifikan terhadap

<sup>21</sup>DR. M. Ridwan, MA, dkk, *Ekonomi Pengantar Mikro dan Makro Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2013), h. 177.

<sup>22</sup>Hengki Derek Wandosa, Arius Kambu, dan Agustinus Numberi, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika" dalam *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, vol.2 No.3 hlm. 646.

				PAD ditolak. Inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD ditolak.
2.	Meri Rahmania (2014)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang	PAD (Y) Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2) Pertumbuhan Ekonomi (X3)	Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Retribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD
3.	Hengki Derek Wandosa (2013)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika	PAD (Y) Retribusi Daerah (X1) Pajak Daerah (X2) Lain-lain PAD yang sah (X3)	Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Retribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

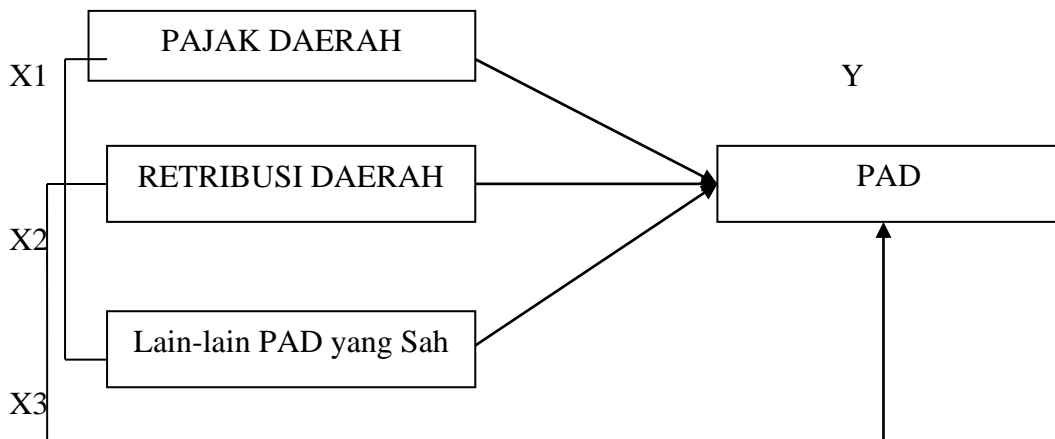
4.	Muhammad Nasir.	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah provinsi Aceh.	PAD (Y) Jumlah penduduk (X1), PDRB (X2), Inflasi (X3).	Jumlah penduduk, berpengaruh terhadap PAD, PDRB dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap PAD.
5.	Riandani Rezki Prana (2016)	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Tebing Tinggi	PAD (Y) Pajak Daerah (X1) Retribusi (X2) PDRB (X3)	Pajak daerah berpengaruh terhadap PAD Retribusi dan PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis (pemikiran) merupakan sintesa dan serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang menjadi acuan penelitian yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan atau alternatif. Solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan, disusun dalam

bentuk matrik, bagan atau gambar.<sup>23</sup> teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



#### **D. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang masih akan diuji kebenarannya. Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

- H1 : Pajak Daerah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- H2 : Retribusi Daerah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- H3 : Lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- H4 : Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Padang Lawas Utara.

---

<sup>23</sup>DR. Azhari Akmal Tarigan, *pedoman Pemilihan Proposal dan Skripsi Ekonomo Islam*, (Medan. Wal Ashri Publshing, 2013), h. 17.

### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Menurut Ezmir, pendekatan penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang secara primer menggunakan paradigma post positivist dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik, menggunakan pengukuran dan observasi, serta pengujian teori), menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik. Sehingga dalam penelitian kuantitatif, sesuai dengan namanya banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel penelitian, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

#### **1. Variabel independen(tidak terikat)**

Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel dependen. Variabel independen yang akan diteliti pada penelitian ini adalah:

- a. Pajak Daerah X1
- b. Retribusi Daerah X2
- c. Lain-lain PAD yang sah X3

---

<sup>24</sup><http://taliabupomai.blogspot.com/2010/10/penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif.html?m=1>. Di unduh tgl 13 Januari 2019 , Jam 14:52 wib.

## 2. Variabel Dependen (terikat)

Menurut HuseinUmar dalam Taliabupomai, variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen yang akan diteliti pada penelitian ini adalah faktor- faktor yang mempengaruhi PAD.

### **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara sebagai objek penelitian. Dengan waktu penelitian yang direncanakan mulai bulan Maret 2019 sampai selesai.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini, seperti Badan Pusat Statistik(BPS) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kab. Padang Lawas Utara. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.<sup>25</sup> Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan atas seluruh elemen dinamakan sensus. Idealnya agar penelitiannya lebih bisa dipercaya, seorang peneliti harus melakukan sensus. Namun karena sesuatu peneliti bisa tidak meneliti keseluruhan elemen tadi, maka yang bisa dilakukannya adalah meneliti sebagian dari keseluruhan elemen atau unsur tadi.<sup>26</sup> Wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

---

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

<sup>26</sup>Isnaini Harahap, Mag, dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (La-Tansa Press), h. 70.

ditarik kesimpulannya<sup>27</sup>. Populasi dari penelitian ini adalah data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lainlain PAD yang Sah, yang diambil dari lima tahun terakhir 2012-2017..

Sampel adalah bagian dari populasi artinya tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan bukan terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Adapun sampel dari penelitian ini yaitu jumlah dari Pajak Daerah.

### **E. Defenisi Operasional**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>28</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu metode penelitian untuk memperoleh informasi dari literatur yang terkait dengan penelitian ini, seperti jurnal penelitian, skripsi, dan buku terbitan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kab.Padang Lawas Utara.

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Pendapatan Asli daerah (Y)**

Merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah selama periode 2012-2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menjadikan padang lawas utara lebih berkembang.

#### **2. Pajak Daerah (X1)**

Merupakan kontribusi wajib kepada Daerah orang yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan yang diukur dengan satuan rupiah.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*,h. 80-81.

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 224.



### **3. Retribusi Daerah (X2)**

Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah selama periode 2012-2017 dalam satuan rupiah.

### **4. Lain-lain PAD yang sah (X3)**

Meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah yang diukur dalam satuan rupiah.

## **F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik data yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu metode penelitian untuk memperoleh informasi dari literatur yang terkait dengan penelitian ini, seperti jurnal penelitian, skripsi, dan buku terbitan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara.

## **G. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. bertujuan menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linear Berganda yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \mu$$

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah

X1 = Pajak Daerah

$X_2$  = Retribusi daerah  
 $X_3$  = Lain-Lain PAD yang sah  
 $a$  = Konstanta  
 $b_1 b_2 b_3$  = Koefisien Regresi  
 $\mu$  = Error Term

Agar hasil yang diperoleh dapat menjelaskan hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat, maka hasil regresi persamaan diatas menggunakan uji statistik berikut ini:

#### 1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk melihat apakah data terbebas dari masalah multikolinearitas dan autokorelasi. Uji asumsi klasik penting dilakukan untuk menghasilkan estimator yang linear tidak bias dengan varian yang minimum (*Best Linear Unbiased Estimator* =BLUE) yang berarti model regresi tidak mengandung masalah. Untuk mencari uji asumsi klasik, penelitian ini menggunakan program E-views 8 karena data dalam penelitian ini bersifat *time series* dan mampu menjelaskan data di bidang ilmu ekonomi.

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian yang diajukan. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Sebagai dasar bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Bila nilai signifikan < 0,05 berarti distribusi data tidak normal tetapi jika nilai signifikan > 0,05 berarti distribusi data normal.<sup>29</sup>

Jika asumsi ini dilanggar maka model regresi dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang ada. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan

---

<sup>29</sup>Dzul Apal Mangun Madin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada) h. 36-38.

untuk menguji normalitas data, antara lain “Normal P-P Plot”, dan uji kolmogorov smirnov.

#### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dan satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Menurut Gujarati, adanya sifat heteroskedastisitas ini dapat membuat penaksiran dalam model bersifat tidak efisien. Umumnya masalah heteroskedastisitas lebih biasa terjadi pada data *cross section* dibandingkan dengan data *time series*.

Heteroskedastisitas muncul apabila *error* atau *residual model* yang diamati tidak memiliki variasi yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Konsekuensi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah estimator yang diperoleh tidak efisien. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas maka dapat digunakan metode uji Glejser. Uji keberadaan heteroskedastisitas dilakukan dengan menguji residual hasil estimasi menggunakan metode *Glejser Heteroskedasticity Test (No Cross Term)* dengan membandingkan nilai Probability  $F_{hitung}$  dengan tingkat signifikan.

$H_0: F_{hitung} < \alpha = 0.05$ , maka terdapat heteroskedastisitas.

$H_1: F_{hitung} > \alpha = 0.05$ , maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

#### c. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi yang kuat diantara variabel-variabel bebas (X) yang diikuti sertakan dalam pembentukan model regresi linear. Uji multikolinearitas perlu dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinearitas. Untuk mengetahui multikolinearitas antar variabel bebas tersebut, dapat dilihat melalui VIF (*variance inflation factor*) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Menurut Rahim dalam Junaedi dirumuskan sebagai berikut:<sup>30</sup>

$$VIF = \frac{1}{1 - R^2}$$

$R^2_j$  diperoleh dari regresi auxiliary antara variabel independen atau koefisien determinasi antara variabel bebas ke- $j$  dengan variabel bebas lainnya. Selanjutnya jika nilai VIF lebih dari 10 maka tidak terdapat multikolinearitas. Tindakan perbaikan multikolinearitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu mengeluarkan salah satu variabel yang berkorelasi tetapi perlu memperhitungkan bias spesifikasi dalam model, cara lain menambah variabel dummy.

#### d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara variabel itu sendiri, pada pengamatan yang berbeda waktu dan individu. Pada umumnya kasus Autokorelasi banyak terjadi pada data time series. Uji Autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian *Durbin Watson (DW)*. Autokorelasi dapat dideteksi melalui uji Durbin-Watson yang merupakan cara yang paling populer, karena terdapat dalam program SPSS. Santoso dan Ashari menyatakan, uji ini menghasilkan nilai DW hitung ( $d$ ) dan nilai DW tabel ( $D_L$  &  $D_U$ ) dengan aturan pengujian sebagai berikut:

1. Apabila  $d < D_L$ , terjadi masalah autokorelasi positif yang perlu perbaikan
2. . Apabila  $D_L < d < D_U$ , ada masalah autokoreasi positif tetapi lemah, dimana perbaikan akan lebih baik
3. Apabila  $D_U < d < 4 - D_U$ , tidak ada masalah autokorelasi
4. Apabila  $4 - D_U < d < D_L$ , masalah autokorelasi lemah, dimana dengan perbaikan akan lebih baik 4-  $D_L <$  masalah autokorelasi serius.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisa data kuantitatif. Metode analisa data kuantitatif adalah metode analisa data yang menggunakan perhitungan angka-angka yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil keputusan didalam memecahkan masalah data-data yang diperoleh dianalisa dengan teori-teori yang telah berlaku secara umum.

---

<sup>30</sup>Junaedi *Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h.4.

## 2. Uji Hipotesis

### a. Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah secara terpisah atau parsial. Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$0 : = 0, = 1,2,3$ , artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial.

$1 : \neq 0, = 1,2,3$ , artinya ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial.

Dasar pengambilan keputusan ditentukan sebagai berikut (Ghozali dalam Yuda Supriyadi):

1. Dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel.

a) Jika  $t_{\text{tabel}} > t_{\text{hitung}}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

b) Jika  $t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

2. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi

a) Apabila nilai signifikansinya  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak

b) Apabila nilai signifikansinya  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

### b. Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dengan uji F maka dapat diketahui apakah pajak daerah, retribusi daerah, dan Lain-lain Pad yang Sah benar-benar berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel pendapatan asli daerah.

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$0 : 1 = 2 = 0$  : tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara simultan.

1 : 1  $\neq$  2  $\neq$  0 : ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara simultan.

Kriteria pengujian dengan melakukan F hitung dengan F tabel:

- 1)  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- 2)  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Kriteria pengujian dengan melihat *probability values*:

- 1) Jika probabilitas f hitung  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- 2) Jika probabilitas f hitung  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

$R^2$  menjelaskan seberapa besar peranan variabel independen terhadap variabel dependen, semakin besar  $R^2$  semakin besar peranan variabel dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 sampai 1.

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Daerah Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis**

Kabupaten Padang Lawas Utara yang dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 17 juli 2017 melalui sidang 1 Paripurna DPR-RI telah disahkan sebagai daerah otonomi baru melalui Undang-undang nomor 37 Tahun 2007. Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai luas wilayah 3.918,05 km<sup>2</sup> dan secara geografis terletak pada 1<sup>o</sup>. 13'. 50'' dan 20. 2'. 32'' Lintang Utara serta 99<sup>o</sup>. 20'. 44'' dan 100<sup>o</sup>. 19'. 10'' Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Padang Lawas Utara Memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Labuhan Batu.

Sebelah Timur : Provinsi Riau.

Sebelah Selatan : Kabupaten Padang Lawas.

Sebelah Barat : Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera utara terdiri dari 8 kecamatan yang kemudian dimekarkan menjadi 9 kecamatan pada tahun 2008. Pada 2016 dimekarkan lagi menjadi 12 kecamatan. 388 desa dan 2 kelurahan pada dasarnya selain sangat potensial sebagai daerah pertanian, peternakan dan perkebunan juga sangat prospektif untuk dikembangkan sebagai daerah transit dan jasa perdagangan khususnya hasil pertanian dan perkebunan karena posisi strategisnya berada pada jalur lintas sumatera. Potensi ini sangat sehingga perlu dibuat terobosan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian.

##### **2. Kondisi dan Topografi**

Topografi daerah Kabupaten Padang Lawas Utara didominasi oleh kemiringan lahan bergunung yaitu 174.719 Ha atau 44,59 % dari luas daerah dan diikuti dengan topografi berbukit yaitu seluas 137.640 Ha atau 35,13% serta

Topografi datar dan landai seluas 79.446 Ha atau 20,28% dari luas wilayah per kecamatan.

### **3. Potensi Wilayah**

Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai banyak potensi Pariwisata yang nantinya bisa menjadi potensi Pendapatan Daerah yang begitu memungkinkan meningkatkan Pendapatan Daerah. Seperti, Candi Bahal di Kecamatan Portibi, Tugu Perjuangan di Pusat Pasar GunungTua, Pemandian air panas di Pangirkiran, Tugu Perjuangan di Sigama, dan masih banyak lagi. Jika seandainya pemerintah setempat mau menggali potensi yang begitu besar. Maka Masyarakat Padang Lawas Utara Pasti akan lebih makmur.

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

Pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang meliputi deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian yang didapat dari hasil analisis ekonometrika setelah diolah menggunakan software eviews 8 dengan menggunakan analisis data Regresi Linear Berganda dan Asumsi Klasik.

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data skunder yang diperoleh melalui proses pengolahan dari instansi yang terkait dengan penelitian. Data diperoleh dari laporan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika. Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh penelitian ini menggunakan data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2012-2017 dengan jumlah observasi sebanyak 5 tahun. Berikut akan disajikan deskripsi data-data dari tiap-tiap variabel yang digunakan.

### **1. Deskripsi Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku selama periode 2012-2017. Dan berikut ini akan disajikan perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.



**Tabel 3.4**  
**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>
<b>2013</b>	<b>15.804.225.385,65</b>
<b>2014</b>	<b>22.172.689.275,33</b>
<b>2015</b>	<b>26.446.077.260,84</b>
<b>2016</b>	<b>30.453.223.133,26</b>
<b>2017</b>	<b>74.524.919.692,80</b>

**BPKD (Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah )  
Kab.Padang Lawas Utara**

Tabel di atas menunjukkan bahwa PAD dikabupaten Padang Lawas Utara tahun 2013 sebesar 15.804.225.385,65, dan di tahun 2014 mengalami Peningkatan sebesar 22.172.689.275,33. Dan ditahun 2015 mengalami peningkatan juga sebesar 26.446.077.260,84 dan ditahun 2016- 2017 PAD terus mengalami peningkatan yang sangat pesat dari tahun sebelumnya

## **2. Deskripsi Pajak Daerah**

Data Pajak Daerah dalam penelitian ini menggunakan data Pajak Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang diperoleh dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam penelitian ini merupakan data skunder dalam bentuk tahunan. Jumlah data yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 5 tahun, mulai tahun 2012-2017.

**Tabel 4.4**  
**Pajak Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>
<b>2013</b>	<b>5.894.591.525,00</b>
<b>2014</b>	<b>4.487.322.409,00</b>
<b>2015</b>	<b>4.693.774.307,00</b>
<b>2016</b>	<b>6.503.992.499,00</b>
<b>2017</b>	<b>13.570.377.879,97</b>

**BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah)  
Kab. Padang Lawas Utara**

Pada tahun 2013, pajak daerah kabupaten padang lawas utara sebesar 5.894.196.812,00. Memasuki tahun 2014 pajak daerah kabupaten padang lawas utara mengalami penurunan yaitu, 4.487.322.409. kemudian pada tahun 2015, 2016, 2017 mengalami kenaikan masing-masing 4.693.774.307; 6.503.992.499; 13.570.377.879,97.

### **3. Deskripsi Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemerintah Daerah meliputi gubernur, bupati, atau walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berikut adalah tabel perkembangan dari Retribusi daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dari tahun 2012-2017.

**Tabel 5.4**  
**Retribusi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Retribusi Daerah</b>
<b>2013</b>	<b>5.915.196.812,00</b>
<b>2014</b>	<b>6.591.423.392,00</b>
<b>2015</b>	<b>5.566.728.436,00</b>
<b>2016</b>	<b>2.764.715.957,00</b>
<b>2017</b>	<b>12.523.583.485,00</b>

**BPKD (Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah )  
Kab. Padang Lawas Utara**

Retribusi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2013 sebesar 5. 280.303.932,00. Dan pada tahun 2014 Retribusi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara mengalami kenaikan menjadi 6.591.423.392,00 dan ditahun 2015, 2016 mengalami penurunan 5.566.728.436,00; 2.764.715.957,00. Dan ditahun 2017 Retribusi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara mengalami peningkatan yang sangat tajam sebesar 12.523.583.485,00. Oleh karena itu Retribusi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dari 2012-2017 mengalami fluktuasi.

#### **4. Deskripsi Lain-lain PAD yang Sah**

Lain-lain Pad yang sah merupakan sumber dari penjualan dari aset tetap daerah, jasa giro, komisi, potongan, atau bentuk lain dari pengadaan barang atau jasa oleh daerah pendapatan bunga keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing dan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan . Berikut ini tabel dari Lain-lain Pad yang sah di Kabupaten Padang Lawas Utara yang diperoleh dari BPKAD ( Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset daerah) Kab. Padang Lawas Utara.

**Tabel 6.4**

**Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>
<b>2013</b>	<b>3.529.128.732,45</b>
<b>2014</b>	<b>10.803.385.530,33</b>
<b>2015</b>	<b>15.705.985.955,84</b>
<b>2016</b>	<b>20.709.347.387,26</b>
<b>2017</b>	<b>47.626.465.984,83</b>

**BPKD (Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah )  
Kab.Padang Lawas Utara**

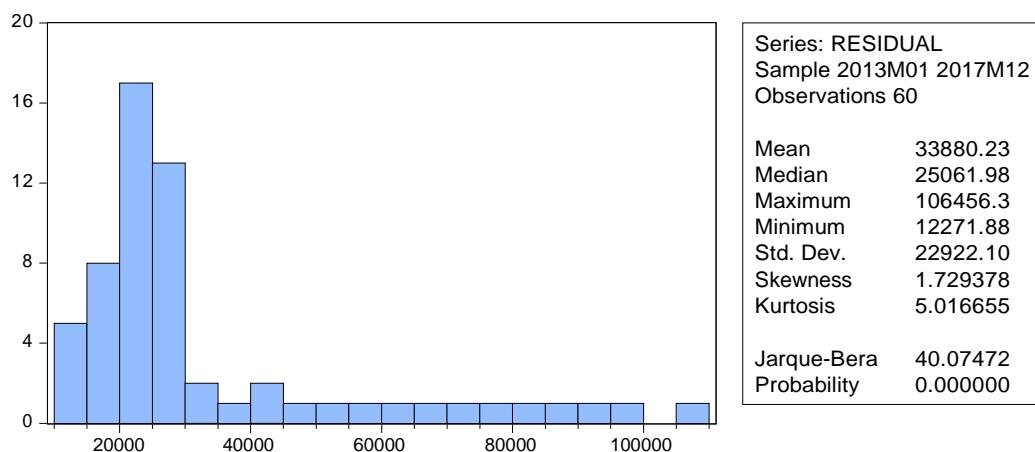
Pada tahun 2013 Lain-lain PAD yang sah diKabupaten Padang Lawas Utara sebesar 3.529.128.732,45, dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan 7% dari tahun sebelumnya dan di tahun 2015 sampai ditahun 2017 Lain-lain PAD yang sah diKabupaten Padang Lawas Utara meningkat sangat drastis. Ditahun 2015 meningkat sebesar 5% dan ditahun 2016 sebesar 5% dan ditahun 2017 sebesar 25 %. Maka sebab itu Lain-lain PAD yang Sah sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah diKabupaten Padang Lawas Utara.

**C. Uji Asumsi Klasik**

Uji Asumsi klasik dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada dasarnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien, pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikoleneartitas, autokorelasi dan heteroskedetisitas.

## 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal.



Sumber : Lampiran, Data Diolah 2019

**Gambar 4.1**  
**Hasil Uji Normalitas**

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 40.07472 sedangkan nilai  $\alpha$  sebesar 0.00, jadi nilai probability yaitu (40.07472) > nilai  $\alpha$  (0.00), maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sudah berdistribusi normal.

## 2. Uji Heteroskedetisitas

Heteroskedetisitas merupakan keadaan dimana semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varian yang sama. Pengujian asumsi ini dilakukan dengan menggunakan uji Glejser.

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	3.028315	Prob. F(4,13)	0.0572
Obs*R-squared	8.682214	Prob. Chi-Square(4)	0.0696

Scaled explained SS                      8.153757    Prob. Chi-Square(4)                      0.0861

---

**Gambar 3.4.**  
**Hasil Uji Heteroskedetisitas**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji heteroskedetisitas menunjukkan nilai Probabilitas Obs\*-Square = 0.0696 >  $\alpha$  (0.00) maka  $H_0$  diterima dengan kata lain model regresi terbebas dari masalah heteroskedetisitas.

**3. Uji Multikoleniaritas**

Multikolinearitas artinya terdapat hubungan linear yang sempurna atau pasti antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi.

**Tabel 7.4**  
**Hasil Uji Multikoleniaritas**

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
PAD	2.48E-05	1.484213	1.318460
Pajak Daerah	2.48E-05	1.484213	1.318460
Retribusi Daerah	4.25E-05	8.693018	1.497456
Lain-lain Pad yang Sah	0.000107	2.640652	1.517295

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Centered VIF dari masing-masing variabel bebas tidak lebih besar dari 10. Artinya tidak terjadi gejala multikoleniaritas pada model regresi.

**4. Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

---

F-statistic	2.615850	Prob. F(2,11)	0.1177
Obs*R-squared	5.801647	Prob. Chi-Square(2)	0.0550

---

**Gambar 4.4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji autokorelasi dengan metode LM menunjukkan nilai Probability Obs\*S-squared sebesar  $0.0550 > \alpha (0,00)$  hal ini berarti tidak ditemukan adanya masalah autokorelasi.

#### D. Uji Hipotesis

**Tabel 8.4**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Dependent Variabel : Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
(Constanta)	23473.09	28721.48	0.817266	0.4285
Pajak Daerah	0.030063	0.004982	6.034608	0.0000
Retribusi Daerah	0.006213	0.003413	1.820392	0.0377
Lain-lain Pad yang Sah	0.052841	0.010321	5.119725	0.0002
R-Squared : 0.928990 Adj. R <sup>2</sup> : 0.907140 D-W : 2.879314	F-Statistic : 42.51793			

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel diatas model estimasinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 27473.09 + 0.030063X_1 + 0.006213X_2 + 0.052841X_3 + \epsilon$$

Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Koefisien Regresi  $X_1$  adalah sebesar 0.030 yang berarti bahwa setiap peningkatan Pajak Daerah sebesar 1% akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 0.030% dengan asumsi variabel lain konstan, begitu juga sebaliknya.
2. Koefisien Regresi  $X_2$  adalah sebesar 0.006 yang berarti bahwa setiap Rtribusi Daerah sebesar 1% akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 0.006% dengan asumsi variabel lain konstan, begitu juga sebaliknya.

3. Koefisien Regresi  $X_3$  adalah sebesar 0.052 yang berarti bahwa setiap peningkatan Lain-lain Pad yang Sah sebesar 1% akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 0.052% dengan asumsi variabel lain konstan, begitu juga sebaliknya.

### **1. Uji Model $R^2$ (Adjust Square)**

Dari hasil regresi di atas diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.928990 atau sebesar 93%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pajak Daerah ( $X_1$ ), Retribusi Daerah ( $X_2$ ), Lain-lain Pad yang Sah ( $X_3$ ) menjelaskan besarnya pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Padang Lawas Utara provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012-2017 sebesar 93%. Adapun sisanya 7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

### **2. Uji t-Statistik**

Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan uji t-statistik, dengan cara melihat nilai t-hitung dibandingkan dengan nilai t-tabel atau dengan cara lainnya dengan melihat nilai probabilitasnya atau p.value. Hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Variabel Nilai Pajak Daerah ( $X_1$ ) memiliki nilai t hitung sebesar 6.034038. Nilai ini lebih besar dari t tabel (1.745884) dan sig t (0.0000) lebih kecil dari 0.05. sehingga pengujian hipotesis penelitian untuk  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di padang Lawas Utara
- b. Variabel Retribusi Daerah ( $X_2$ ) memiliki nilai t hitung sebesar 1.820392. Nilai ini lebih besar dari t tabel (1.745884) dan sig t (0.0377) lebih kecil dari 0.05. Sehingga pengujian hipotesis penelitian untuk  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD Padang Lawas Utara



- c. Variabel Lain-lain PAD yang Sah (X3) Pajak Daerah memiliki nilai  $t$  hitung sebesar 5.119725. Nilai ini lebih besar dari  $t$  tabel (1.745884) dan  $\text{sig } t$  (0.0002) lebih kecil dari 0.05. Sehingga pengujian hipotesis penelitian untuk  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD Padang Lawas Utara. Lain-lain PAD yang Sah memiliki nilai  $t$  hitung sebesar 3.204302. Nilai ini lebih besar dari  $t$  tabel (1.745884) dan  $\text{sig } t$  (0.0069). Sehingga pengujian hipotesis penelitian untuk  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap PAD Padang Lawas Utara.

### 3. Uji F Statistik

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independent variable) berpengaruh nyata atau tidak secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependent variable) dengan membandingkan nilai F-hitung dan F-tabel:

Kriteria :  $H_0$  diterima apabila  $\text{Prob (F-statistik)} > \alpha$  (0.00)

$H_a$  diterima apabila  $\text{Prob (F-statistik)} < \alpha$  (0.00)

$\text{Prob (F-statistik)} : 0.00000$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa F-statistic adalah 42.51793. Nilai ini lebih besar dari F tabel (3.29). Nilai Prob F-Statistik (0.00000) lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Sehingga pengujian hipotesis  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa secara simultan Pajak daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Lain-lain Pad yang Sah (X3) da berpengaruh signifikan terhadap PAD Padang Lawas Utara dengan kekuatan 93%.

### E. Interpretasi Hasil Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pad yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Padang Lawas Utara, berdasarkan hasil uji yang dilakukan dengan menggunakan program evIEWS 8 hasil Uji Regresi Linear Berganda menunjukkan bahwa semua variabel independent yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan

Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Padang Lawas Utara, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima.

### **1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli di Kab. Padang Lawas Utara**

Berdasarkan hasil regres Pajak Daerah diperoleh nilai koefisien sebesar 0.030063 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari taraf signifikan 5% (0.05) menjelaskan bahwa setiap Pajak Daerah naik 1% maka akan menaikkan PAD sebesar 0.030% dengan asumsi ceteris paribus. Dengan demikian Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD di kab. Padang Lawas Utara tahun 2012-2017. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Meri Rahmania yang menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD Kota Padang. Hasil penelitian ini juga menunjukkan kesesuaian dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap PAD.

Menurut Mardiasmo, Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah dan ditetapkan oleh peraturan daerah. Pajak daerah merupakan sumber dari pendaptan asli daerah yang mempunyai efek positif terhadap suatu daerah. Dalam penelitian terdahulu menemukan bahwa Pajak daerah cukup besar sebagai salah satu pendapatan asli daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini mendukung temuan dari Meri Rahmania (2014) yang menemukan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap PAD di Kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Pajak daerah berpengaruh terhadap PAD. Peningkatan hasil pajak daerah akan merangsang pendapatan ekonomi di daerah, multiplier effect terhadap pendapatan

daerah, multiplier tersebut akan meningkatkan PAD seiring dengan meningkatnya Pajak daerah tersebut.<sup>31</sup>

## **2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kab. Padang Lawas Utara**

Berdasarkan hasil regresi, Retribusi Daerah diperoleh nilai koefisien sebesar 0.006213 dan nilai probabilitas sebesar 0.0377 lebih kecil dari taraf signifikan 5% (0.05) menjelaskan bahwa setiap Retribusi Daerah naik 1% maka akan menaikkan PAD sebesar 0.006% dengan asumsi ceteris paribus. Dengan demikian Retribusi Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD di Kab. Padang Lawas Utara tahun 2012-2017. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini mendukung temuan dari Hengki Derek Wandosa (2013) yang menemukan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kab. Mimika. Hasil penelitian ini juga menunjukkan kesesuaian dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kab. Mimika<sup>32</sup>

## **3. Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kab. Padang Lawas Utara**

Berdasarkan hasil regresi, Lain-lain PAD yang Sah diperoleh nilai koefisien sebesar 0.052841 dan nilai probabilitas sebesar 0.0002 lebih kecil dari taraf signifikan 5% (0.05) menjelaskan bahwa setiap naik Lain-lain PAD yang Sah 1% maka akan meningkatkan PAD sebesar 0.052% dengan asumsi ceteris paribus. Dengan demikian Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD di Kab. Padang Lawas Utara tahun 2012-2017. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

---

<sup>31</sup>Meri Rahmania, “ *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang*”, dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume V, Januari 2014.

<sup>32</sup>Hengki Derek Wandosa, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kab. Mimika* dalam Jurnal Ekonomi Volume 2, Februari 2013

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Riandanai Rezeki Prana (2016) yang menyatakan bahwa variabel independen Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh positif terhadap Pendapatan asli Daerah dan secara signifikan.

Dengan adanya pengaruh Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara signifikan tersebut sesuai dengan teori Abdul Halim bahwa Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi Lain-lain PAD yang Sah maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerahnya.

#### **4. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pad yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kab. Padang lawas Utara**

Berdasarkan dari hasil regresi bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah di kab. Padang lawas utara, dan retribusi daerah juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kab. Padang lawas utara dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dan dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah secara simultan berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kab. Padang lawas Utara.

Diantara tiga variabel independen yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yaitu, Lain-lain PAD yang Sah memiliki nilai koefisien 0.052841 dan nilai probabilitas sebesar 0.0002 lebih kecil dari taraf signifikan 5% (0.05) jika lain-lain PAD yang sah naik 1% maka PAD akan meningkat sebesar 0.052%

Sedangkan Pajak daerah memiliki nilai koefisien sebesar 0.030063 dan nilai probabilitas sebesar 0.000 lebih kecil dari taraf signifikan 5% (0,05) jika pajak daerah naik 1% maka akan menaikkan PAD sebesar 0.30%, dan retribusi daerah memiliki nilai koefisien sebesar 0.006213 dan nilai probabilitas sebesar 0.0377 lebih kecil dari taraf signifikan 5% (0.05) menjelaskan bahwa setiap Retribusi Daerah naik 1% maka akan menaikkan PAD sebesar 0.006%,

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Pajak Daerah dari tahun 2012-2017 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Padang Lawas Utara. Karena pajak daerah memiliki nilai  $t$  hitung sebesar 6.034038. Nilai ini lebih besar dari  $t$  tabel (1.745884) dan  $sg\ t$  (0.0000) lebih kecil dari 0.05. sehingga pengujian hipotesis penelitian untuk  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Retribusi Daerah dari tahun 2012-2017 memiliki nilai  $t$  hitung sebesar 1.820392. Nilai ini lebih besar dari  $t$  tabel (1.745884) dan  $sig\ t$  (0.0377) lebih kecil dari 0.05. Sehingga pengujian hipotesis penelitian untuk  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD Padang Lawas Utara.
3. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Lain-lain PAD yang Sah dari tahun 2012-2017 diperoleh nilai koefisien sebesar 0.052841 dan nilai probabilitas sebesar 0.0002 lebih kecil dari taraf signifikan 5% (0.05) menjelaskan bahwa setiap Lain-lain PAD yang Sah naik 1% maka akan meningkatkan PAD sebesar 0.052% dengan asumsi ceteris paribus. Dengan demikian Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD di Kab. Padang Lawas Utara tahun.
4. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Padang Lawas Utara.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus selalu meningkatkan kinerja perekonomian dengan melakukan efisiensi dan transparansi anggaran ke publik serta mencari sumber-sumber pendapatan daerah lain yang dapat menunjang perekonomian daerah itu sendiri.
2. Pemerintah diharapkan lebih tegas dalam melakukan peraturan yang berkenaan dengan pelanggaran terhadap pajak serta selalu proaktif dalam meningkatkan pajak daerah terutama dalam meningkatkan retribusi daerah.
3. Disamping itu pemerintah harus lebih bijaksana dalam penerapan iuran yang berupa retribusi daerah, retribusi yang tinggi tidak menjamin meningkatkan kinerja perekonomian.
4. Pemerintah diharapkan juga aktif serta kreatif dalam menemukan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah, sehingga sumber pendapatan akan lebih banyak serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
5. Diharapkan lebih banyak lagi penelitian yang sejenis dengan variabel dan model yang baru sehingga akan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Pajak Daerah dari tahun 2012-2017 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Padang Lawas Utara. Karena pajak daerah memiliki nilai  $t$  hitung sebesar 6.034038. Nilai ini lebih besar dari  $t$  tabel (1.745884) dan  $sg\ t$  (0.0000) lebih kecil dari 0.05. sehingga pengujian hipotesis penelitian untuk  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Retribusi Daerah dari tahun 2012-2017 memiliki nilai  $t$  hitung sebesar 1.820392. Nilai ini lebih besar dari  $t$  tabel (1.745884) dan  $sig\ t$  (0.0377) lebih kecil dari 0.05. Sehingga pengujian hipotesis penelitian untuk  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD Padang Lawas Utara.
3. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Lain-lain PAD yang Sah dari tahun 2012-2017 diperoleh nilai koefisien sebesar 0.052841 dan nilai probabilitas sebesar 0.0002 lebih kecil dari taraf signifikan 5% (0.05) menjelaskan bahwa setiap Lain-lain PAD yang Sah naik 1% maka akan meningkatkan PAD sebesar 0.052% dengan asumsi ceteris paribus. Dengan demikian Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD di Kab. Padang Lawas Utara tahun.
4. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Padang Lawas Utara.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

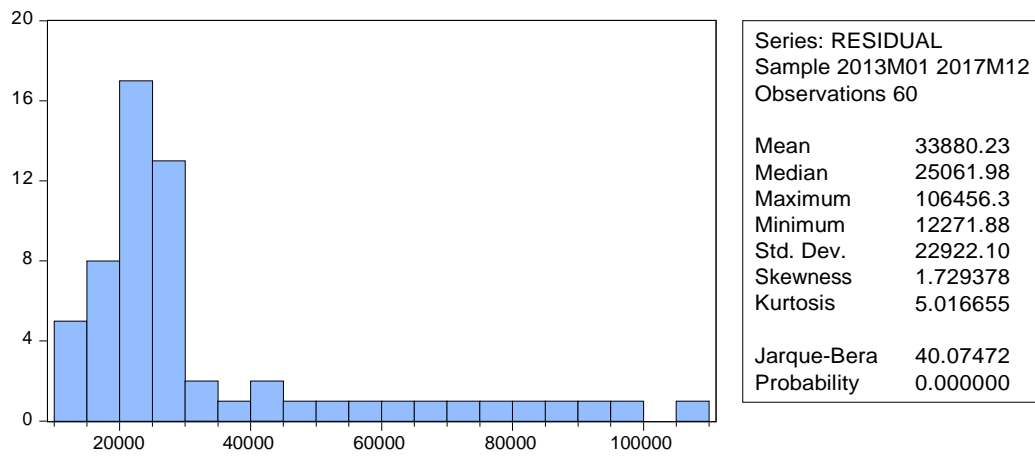
1. Pemerintah harus selalu meningkatkan kinerja perekonomian dengan melakukan efisiensi dan transparansi anggaran ke publik serta mencari sumber-sumber pendapatan daerah lain yang dapat menunjang perekonomian daerah itu sendiri.
2. Pemerintah diharapkan lebih tegas dalam melakukan peraturan yang berkenaan dengan pelanggaran terhadap pajak serta selalu proaktif dalam meningkatkan pajak daerah terutama dalam meningkatkan retribusi daerah.
3. Disamping itu pemerintah harus lebih bijaksana dalam penerapan iuran yang berupa retribusi daerah, retribusi yang tinggi tidak menjamin meningkatkan kinerja perekonomian.
4. Pemerintah diharapkan juga aktif serta kreatif dalam menemukan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah, sehingga sumber pendapatan akan lebih banyak serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
5. Diharapkan lebih banyak lagi penelitian yang sejenis dengan variabel dan model yang baru sehingga akan menambah khasanah ilmu pengetahuan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al- 'Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005
- Diana Lestari, “ *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda,*” dalam *Jurnal Pendapatan Asli Daerah*, vol. 27 No.5 Oktober 2017.
- Direktur Poliban Edi Yohanes, *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia 2017.
- Dwi DamasAnggoro, S.AB, MA, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press 2016.
- Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
- \_\_\_\_\_ *Pajak menurut Syariah: Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Halim Abdul , *Pajak daerah*. Jakarta: Media, 2015
- Harahap Isnaini, dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* La-Tansa Press
- Harahap Ramadhan Ahmad, “ *Analisi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara,*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Medan, 2014.
- Hengki Derek Wandosa, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli daerah di Kab. Mimika* dalam jurnal Ekonomi Volume 2, Februari 2013
- <http://syiar.republika.co.id/36836/hukum-pajak-untuk-Syariah>
- <http://taliabupomai.blogspot.com/2010/10/penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif.html?m=1>
- <https://nainah93.wordpress.com/2013/09/23/makalah-pajak-dalam-islam>
- Junaedi *Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 3*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011
- Lutfi Ahmad, *Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah*. Bandung: Pustaka Media, 2014

## 5. Uji Normalitas



Sumber : Lampiran, Data Diolah 2019

### Realisasi PAD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012-2017

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah
<b>2013</b>	15.804.225.385,65	5.894.591.525,00	5.915.196.812,00	465.308.284,00	3.529.128.732,45
<b>2014</b>	22.172.689.275,33	4.487.322.409,00	6.591.423.392,00	290.557.944,00	10.803.385.530,33
<b>2015</b>	26.446.077.260,84	4.693.774.307,00	5.566.728.436,00	479.588.562,00	15.705.985955,84
<b>2016</b>	30.453.223.133,26	6.503.992.499,00	2.764.715.957,00	475.167.290,00	20.709.347.387,26
<b>2017</b>	74.524.919.692,80	13.570.377.879,97	12.523.583.485,00	804.492.343,00	47.626.465.984,83